

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Teori Pemangku Kepentingan

a. Definisi

Freeman & David (1983) mengemukakan bahwa definisi dari pemangku kepentingan adalah setiap kelompok maupun perorangan yang memiliki pengaruh atas tercapainya tujuan perusahaan, dan dalam teori pemangku kepentingan itu sendiri ditekankan pada peranan manajemen dalam menilai pentingnya pertemuan pemangku kepentingan sebagai tuntutan untuk tercapainya tujuan perusahaan yang strategis.

Wawasan terkait pemangku kepentingan tentu sangatlah luas, pemangku kepentingan dalam arti luas itu sendiri didefinisikan sebagai setiap individu ataupun kelompok yang diidentifikasi dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau yang dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Dalam arti sempit, pemangku kepentingan didefinisikan sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat membantu organisasi untuk kelangsungan hidupnya yang berkelanjutan.

Pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam ruang lingkup CSR terutama menjadi fokus bagi pemegang saham dalam sejarah perusahaan. Pemangku kepentingan perusahaan mencakup setidaknya karyawan, pelanggan, pemasok, media, dan organisasi, LSM dan masyarakat serta pasar tempat mereka beroperasi.





Pemangku kepentingan adalah mereka yang terpengaruh dan dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan perusahaan. Para pemangku kepentingan memungkinkan dilibatkan dalam perdebatan dalam proses pengambilan keputusan yang akan menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan.

Sesuai dengan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi pemangku kepentingan adalah individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan terhadap suatu sumber daya alam tertentu. Sedangkan Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) adalah teori yang mengilustrasikan kepada pihak mana saja perusahaan harus bertanggung jawab. Dalam teori ini manajemen organisasi dan etika atas bisnis yang berkaitan erat dengan nilai serta moral dalam mengelola suatu organisasi.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

b. Klasifikasi Pemangku Kepentingan

Suatu lingkup yang luas jika membahas terkait klasifikasi pemangku kepentingan, tetapi klasifikasi menurut Freeman & David (1983) dibagi menjadi dua kategori besar berdasarkan karakteristiknya yaitu pemangku kepentingan primer dan sekunder. Pemangku kepentingan primer antara lain sekelompok investor, karyawan, konsumen, serta pemasok yang memiliki peran penting terhadap keberlangsungan perusahaan. Sedangkan pemangku kepentingan sekunder yaitu komunitas dan juga pemerintah, dimana tidak adanya hubungan secara khusus dengan transaksi perusahaan namun secara tidak langsung memiliki pengaruh dan dapat dipengaruhi oleh perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Konsep dari pemangku kepentingan sudah menjadi hal yang diketahui oleh umum bahwa perusahaan memiliki kewajiban kepada para pemegang saham, pemegang ekuitas perusahaan yang tidak dapat diganggu gugat Freeman & David (1983).

Keterlibatan pemangku kepentingan adalah proses yang digunakan dalam dunia bisnis untuk melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan untuk tujuan yang jelas guna mencapai tujuan perusahaan. Pelibatan pemangku kepentingan yang selaras secara strategis dan efektif sangatlah penting, karena jika tidak laporan keberlanjutan tidak dianggap sepenuhnya akuntabel dan kredibel oleh pemangku kepentingan. Dalam keterlibatan pemangku kepentingan adalah bagian penting dari proses pelaporan perusahaan, karena memberikan kesempatan mengidentifikasi dan mengelola masalah material yang muncul dari perspektif pemangku kepentingan, juga meningkatkan pemahaman tentang bagaimana kegiatan usaha berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Serta mempromosikan kolaborasi yang produktif dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja operasional dan pengambilan keputusan.

Melibatkan pemangku kepentingan dalam perusahaan mencerminkan bahwa para pemangku kepentingan sangat penting untuk mempertahankan bisnis yang berkelanjutan dan inklusivitas dalam pelaporan keberlanjutan dan aktivitasnya terkait menciptakan kekayaan dalam jangka yang panjang bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dengan demikian, keterlibatan para pemangku kepentingan yang sistematis diperlukan untuk memperkuat rasa saling percaya, pemahaman, dan keselarasan antara perusahaan dan para pemangku kepentingannya Calabrese et al.(2015).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Teori Legitimasi

a. Definisi

Menurut Suchman (1995) legitimasi didefinisikan sebagai asumsi atau tanggapan umum atas langkah suatu entitas yang diharapkan, pantas, atau sesuai dengan beberapa sistem nilai, aturan, keyakinan, dan pernyataan yang dibangun secara sosial.

Menurut Linblom (1994) definisi legitimasi adalah kondisi dimana sistem nilai suatu entitas sejalan dengan sistem nilai masyarakat. Sehingga dalam hal ini, sangat penting untuk memenuhi ketentuan serta harapan masyarakat untuk meyakinkan keberlangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang. Selain itu, pendukung teori ini memiliki berpendapat bahwa laporan keberlanjutan cenderung untuk menekan risiko adanya tindakan regulasi dan boikot oleh pemangku kepentingan, serta mendukung izin perusahaan untuk terus beroperasi.

Maka dapat dikatakan bahwa teori legitimasi ini adalah metode yang dapat mendorong perusahaan dalam menerapkan serta meningkatkan klaim sosial dan lingkungan secara jujur untuk memenuhi segala kontrak sosialnya, serta mengizinkan adanya penetapan atas tujuan dan kelangsungan hidup di lingkungan yang membeludak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Kesesuaian Program Perusahaan dengan Harapan Masyarakat

Asumsi sosial dari aktivitas organisasi diperlukan adanya kesesuaian dengan keinginan dan harapan masyarakat, karena dalam keadaan dimana kegiatan perusahaan tidak sesuai dengan nilai dan adab yang berlaku, maka organisasi tersebut berpotensi mendapatkan teguran dari masyarakat, teguran ini bahkan dapat menyebabkan organisasi berada dalam kegagalan.

Strategi sosial yang dibentuk pada ulasan kebijakan yang komprehensif dalam jangka waktu panjang guna memperkuat kepercayaan terhadap kepercayaan masyarakat, serta dijadikan bekal sosial dalam menjalankan praktik perusahaan dengan penuh strategi. Bentuk komprehensif ini adalah dengan menyelenggarakan pelayanan masyarakat secara menyeluruh guna meminimalisir ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, serta sebagai bentuk dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penanggung jawab kebijakan sosial yaitu pemerintah.

Maka dapat dikatakan dalam kesesuaian program perusahaan dengan harapan masyarakat adalah sikap dimana perusahaan harus menjustifikasi eksistensi melalui aktivitas sosial dan ekonomi yang valid dimana tidak membahayakan eksistensi masyarakat maupun lingkungan di tempat di mana organisasi tersebut berkegiatan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Laporan Keberlanjutan

a. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut David, et al(2008) definisi tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan hubungan perusahaan dan masyarakat dimana perusahaan itu beroperasi. Adapun definisi lain yang berkenaan dengan tanggung jawab perusahaan ialah hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan.

Menurut Wood (1991) corporate social responsibility (CSR) didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan yang berasal dari gagasan bahwa bisnis dan masyarakat saling memiliki keterkaitan dan menurut McWilliams & Siegel (2001) bahwa perusahaan perlu mempromosikan beberapa kebaikan sosial di samping apa yang diwajibkan oleh hukum.

Maka dapat dikatakan bahwa gagasan tentang tanggung jawab sosial perusahaan yaitu salah satu bagian dari siasat bisnis perusahaan untuk jangka panjang. Tanggung jawab sosial perusahaan memiliki konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala dimensi fungsional perusahaan terhadap segala bentuk masalah yang memiliki dampak pada lingkungan. Sehingga tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya berfokus pada konsep pemberian bantuan berupa dana kepada lingkungan sosial, namun berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperlakukan dan menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Pergeseran Paradigma Keberlanjutan 1P (*Profit*) ke 3P (*Profit, Planet, People*)

Pada tahun 1950-an pertama kali *single bottom line* atau yang sering disebut paradigma keberlanjutan 1P (*profit*) muncul. Pada konsep ini perusahaan dipandang hanya untuk mengumpulkan keuntungan (*profit*) sebanyak-banyaknya tanpa harus mempertimbangkan dampak yang akan muncul dari aktivitas usaha tersebut. Demikian dalam pendekatan ini multidimensi pelaporan keuangan hanya terlihat pergerakannya pada sistem yang terdapat dalam *single bottom line* James Kamwachale Khomba (2012).

Pada dasarnya ada masa dimana setiap perusahaan awalnya hanya mementingkan kepentingan perusahaan saja tanpa mempertimbangkan baik lingkungan maupun sosialnya, yang pada akhirnya sering kali terjadi pergesekan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Sehingga menyebabkan terjadinya demo karena perusahaan dianggap merugikan masyarakat setempat dengan adanya pencemaran udara dan air dari limbah pabrik.

Oleh karena itu, dalam pendekatan *single bottom line* ini membutuhkan adanya gambaran serta peluang. *Single bottom line* memberikan penawaran terkait efisiensi yang lebih besar daripada pendekatan seperti tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), penciptaan nilai bersama, dan *double* atau *triple bottom lines* dalam manfaat sosial serta penentuan keputusan. Karena pendekatan *single bottom line* ini lebih mengarah pada penjabaran logika terkait bisnis untuk perdebatan serta prinsip, panduan, dan perlengkapan praktis dalam penerapan yang terpusat pada nilai-nilai keberlanjutan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Selanjutnya munculnya *triple bottom line* atau yang disebut dengan 3P (*profit, planet, people*) diperkenalkan oleh John Elkington (1998) dimana dalam pendekatan ini yang dianjurkan untuk dunia usaha adalah dengan konsep berpikir bahwa suksesnya perusahaan tidak hanya di dalam usahanya yang berkaitan dengan kinerja keuangan, tetapi juga yang berkaitan dengan lingkungan, masyarakat, dan ekonomi secara luas, karena persetujuan untuk perusahaan dapat beroperasi harus menonjolkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

Pendekatan ini mencakup 3 aspek sekaligus, profit dimana perusahaan harus mendapatkan keuntungan yang besar secara ekonomis untuk dapat melanjutkan serta mengembangkan usahanya. Selain itu, planet yang memaksa perusahaan untuk memiliki rasa peduli dan mementingkan lingkungan dimana perusahaan tersebut beraktivitas. Adapun yang terakhir adalah people, dalam hal ini perusahaan dituntut memiliki rasa peduli tidak hanya seperti yang dijelaskan dalam poin planet tetapi memiliki rasa peduli terhadap kesejahteraan manusia.

Dari banyaknya berbagai pendapat terkait 3P (*Profit, Planet, People*) terlihat jelas dimana pencapaian atas pengembangan yang memercayakan prinsip keberlanjutan tidak hanya menyalurkan manfaat hanya bagi bumi, tetapi juga bagi keberlanjutan hidup baik manusia maupun usaha, yang sudah dikenal dengan paradigma keberlanjutan 3P (*profit, planet, people*). Kendati demikian, tantangan yang ada dalam bahasan keberlanjutan ialah analisis serta pengukuran atas indikator keberlanjutan tersebut. Kepelikan dari indikator keberlanjutan yakni derivatif dari kepelikan dimensi keberlanjutan (terutama jalinan antardimensi) yang mana berdampak pada kepelikan dalam analisis serta pengukuran di tatanan yang empiris.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Standar Penyusunan Laporan Keberlanjutan

a. GRI Standar

GRI (2016) *Global Reporting Initiative* adalah sebuah wadah internasional yang berdiri sendiri yang menyokong perusahaan atau bisnis serta bertanggung jawab atas dampak yang dialami, dengan menyediakan satu bahasa yang global atau umum untuk dapat menyampaikan dampak tersebut.

Adapun tujuan dari GRI standar itu sendiri adalah untuk menciptakan suatu prosedur pokok terkait akuntabilitas yang dapat menjamin suatu perusahaan agar patuh atas hakikat dari sikap terhadap lingkungan yang bertanggung jawab, yang selanjutnya dapat diperluas termasuk pada masalah tata kelola, sosial dan ekonomi.

b. AA1000AP

AA1000AP (2018) memberikan satu set rangkaian terkait prinsip pedoman praktis yang diterima dengan luas secara internasional pada organisasi atau perusahaan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi, memajukan, dan memberikan komunikasi tanggung jawab dan kemampuan keberlanjutan mereka. Serta memberikan pedoman terkait seperti apa organisasi/perusahaan dapat menjadi dan tetap memiliki rasa tanggung jawab atas hasil dan konsekuensinya terhadap sistem ekologi secara lebih luas.

Yang dapat diterapkan pada seluruh macam dan skala organisasi/perusahaan, terpenting dirancang untuk perusahaan-perusahaan yang mana dimaksudkan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih terbuka, bertanggung jawab, serta esensial untuk mengendalikan kemampuan keberlanjutan.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1
Prinsip-prinsip Akuntabilitas



Sumber : AA1000AP (2018)

c. AA1000AS

AA1000AS (2020) dipakai guna sebagai patokan untuk agunan informasi keberlanjutan dalam semua jenis organisasi sesuai dengan penerapan yang efektif atas prinsip akuntabilitas AA1000. Serta menyesuaikan yang bukan aspek keuangan dari keberlanjutan dengan aspek yang berkaitan dengan laporan keuangan serta jaminan atau dikenal dengan *assurance*. Selain itu, juga bermaksud untuk melewati pemeriksaan ulang data yang sederhana dan memiliki fokus pada proses yang dibutuhkan terkait keterlibatan jaminan yang memiliki tanggung jawab serta lengkap berdasarkan prinsip AA1000AP (2018) yaitu *Inklusivitas, Materialitas, Responsif, dan Dampak*. Dan dapat dipakai ntuk penilaian mandiri internal perusahaan / organisasi secara internal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

AA1000AS (2020) memberikan penjelasan tentang :

- (1) Bagaimana mendefinisikan ruang lingkup serta prakondisi ketika menyetujui perikatan asuransi yang mana standar tersebut digunakan.
- (2) Bagaimana cara melakukan penyesuaian yang sesuai dengan standar.
- (3) Bagaimana cara opsional dalam melaporkan isu akhir atas pernyataan jaminan ke manajemen.

Gambar 2.2
Proses Assurance Standard AA1000AS v3



Sumber : AA1000AS (2020)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

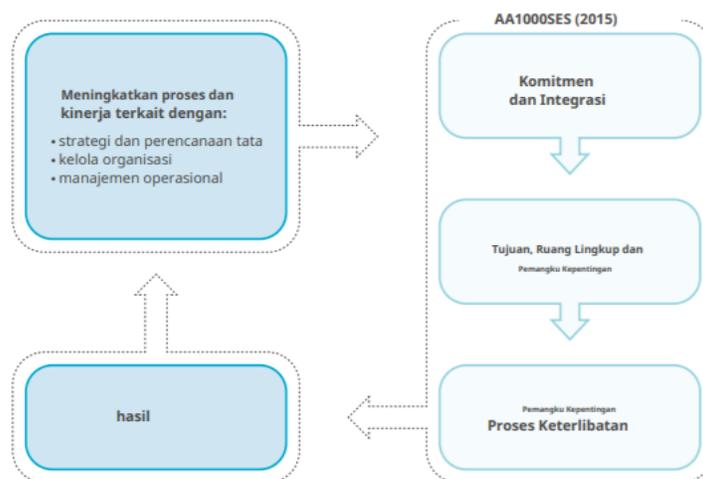


d. AA1000SES

AA1000SES (2013) ialah struktur kerja dengan sumber terbuka yang dapat dilakukan secara umum guna mengevaluasi, menyusun, menerapkan, dan menyampaikan program yang terintegrasi terkait keterlibatan pemangku kepentingan. Struktur kerja tersebut digambarkan sebagai berikut :

- (1) Bagaimana membangun komitmen untuk kepentingan keterlibatan pemangku kepentingan.
- (2) Bagaimana menentukan tujuan, ruang lingkup, serta pemangku kepentingan dari organisasi/perusahaan,
- (3) Bagaimana mengintegrasikan keterlibatan pemangku kepentingan dengan tata kelola, strategi, dan operasi.
- (4) Bagaimana proses yang akan memberikan praktik keterlibatan yang berkualitas dan inklusif, serta hasil yang berharga.

Gambar 2.3
Tujuan dan Ruang Lingkup AA1000SES



Sumber : AA1000SES (2013)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. **POJK No. 51/POJK.03/2017**

© Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

POJK No. 51 Tahun 2017 mengatur mengatur terkait penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Bertujuan untuk melaksanakan perekonomian lokal yang inklusif, sebanding, dan memiliki keberlanjutan dengan maksud akhir mewariskan kesejahteraan dari segi sosial dan ekonomi bagi semua, serta melindungi dan mengawasi lingkungan hidup.

Adapun maksud penerapan keuangan berkelanjutan adalah untuk menyediakan sumber daya keuangan yang memadai guna mencapai tujuan pembangunan yang berkaitan perubahan iklim, memperkuat ketahanan dan daya saing LJK, emiten, dan perusahaan publik dengan upaya manajemen risiko lingkungan dan sosial yang lebih baik dan/atau jasa yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan untuk memberikan kontribusi positif bagi keseimbangan sistem keuangan, meminimalisir ketimpangan sosial, meminimalisir kerusakan lingkungan, melindungi keanekaragaman hayati dan mendukung efisiensi penggunaan energi dan sumber daya alam. Serta meningkatkan pengembangan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



5. Materialitas

a. Definisi

Materialitas pada umumnya dipandang sebagai batas yang mana memengaruhi ketetapan ekonomi dari para pihak yang memakai laporan keuangan perusahaan, khususnya adalah investor. Pada pelaporan keberlanjutan ini, materialitas ini merupakan pokok dalam penentuan topik yang relevan dimana cukup krusial dan perlu untuk dilaporkan. GRI Standar (2016).

b. Penentuan Materialitas

Menurut GRI Standar (2016) penentuan topik yang material, perusahaan perlu memperhitungkan aspek berikut :

- (1) Dampak dari ekonomi, lingkungan serta sosial yang krusial (contohnya perubahan iklim, HIV-AIDS, serta kemiskinan) yang mana telah diidentifikasi terlebih dahulu menggunakan penyelidikan yang persisten yang dilakukan oleh para pihak yang memiliki keahlian di bidangnya, atau dilakukan oleh badan yang ahli dan berpengalaman serta diakui.
- (2) Perhatian utama dan cita-cita para pihak pemangku kepentingan yang mana diinvestasikan ke perusahaan, baik seperti karyawan ataupun para pemegang saham.
- (3) Perhatian utama dari ekonomi, sosial, serta lingkungan secara luas, beserta dengan topik yang diungkapkan oleh para pihak dari pemangku kepentingan. Baik pekerja magang atau *freelance*, *supplier*, masyarakat setempat, kelompok mayoritas, serta masyarakat publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (4) Pokok bahasan serta tantangan industri sektor yang berkaitan di masa depan , serupa dengan yang diidentifikasi oleh para pesaing di industri.
- (5) Hukum, aturan, perjanjian yang bersifat internasional maupun sukarela terkait dengan pemahaman strategis untuk perusahaan.
- (6) Nilai, regulasi, program, sistem manajemen operasional, target, serta sasaran perusahaan yang pokok.
- (7) Keahlian inti dari perusahaan dan cara untuk dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.
- (8) Dampak bagi perusahaan terkait yang mana berdampak juga terhadap ekonomi, lingkungan, sosial, ataupun masyarakat.
- (9) Topik yang material harus diprioritaskan secara tepat dalam laporan.

c. Pengujian Materialitas

Pengujian Materialitas diperlukan adanya pertimbangan faktor berikut :

- (1) Laporan keberlanjutan memperhitungkan konsekuensi yang timbul disebabkan oleh organisasi/perusahaan pelapor, yang mana dikontribusikan atau secara langsung berkaitan dengan relasi bisnis yang melibatkan serta mengutamakan segala informasi yang material atas dasar prinsip materialitas, latar belakang keberlanjutan, dan keterlibatan pemangku kepentingan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Informasi dalam laporan keberlanjutan melibatkan segala konsekuensi yang signifikan di dalam periode pelaporannya, serta estimasi yang lazim dari konsekuensi substansial pada waktu yang akan datang ketika konsekuensi-konsekuensi tersebut dinilai cukup dapat diestimasi serta dapat menjadi tidak bisa dihindarkan dan tidak bisa ditiadakan;
- (3) Laporan keberlanjutan ini tidak menghapus informasi yang tepat dan secara konkret dapat memengaruhi evaluasi serta ketetapan para pemangku kepentingan, atau yang merepresentasikan dampak dari ekonomi, lingkungan, serta sosial yang substansial.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

d. Pelaporan Topik Material

(1) Informasi umum GRI 102

Persyaratan pelaporan :

- (a) Deskripsi terkait proses dalam penentuan isi laporan serta batasan topik.
- (b) Deskripsi terkait tata cara organisasi/perusahaan dalam penerapan prinsip pelaporan guna menentukan isi laporan.
- (c) Dalam pengumpulan informasi yang telah ditentukan, perusahaan/organisasi yang melaporkan harus melibarkan penjelasan terkait bagaimana prinsip material dilakukan dalam pengidentifikasian topik material, termasuk dengan asumsi yang dibuat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Informasi spesifik topik material GRI 103-1

Menurut GRI 103-1 (2016) setiap topik yang material, perusahaan atau organisasi atau perusahaan pelapor wajib melaporkan informasi berikut :

- (a) Pemaparan tentang mengapa topik tersebut dapat dikatakan bersifat material.
- (b) Batas untuk topik yang material, perlu mencakup penjelasan mengenai lokasi terjadi dampak, kontribusi perusahaan atas dampak ataupun yang secara langsung berkaitan dengan dampak yang timbul dari hubungan bisnis perusahaan tersebut.
- (c) Setiap pembatasan yang secara khusus terkait dengan batasan topik.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. Prinsip Materialitas menurut AA1000P

Ⓒ Kriteria yang diperlukan dalam penerapan prinsip materialitas :

Gambar 2.4
Prinsip Materialitas AA1000AP

✓ KRITERIA-KRITERIA KEPATUHAN YANG DIBUTUHKAN

Tindakan-tindakan berikut ini dirancang untuk memandu organisasi-organisasi baik dalam menerapkan Prinsip Materialitas maupun memantau kemajuan mereka sendiri dalam penerapannya. Pemenuhan kriteria-kriteria ini menghasilkan kepatuhan terhadap Prinsip tersebut. Kriteria-kriteria ini juga digunakan oleh penyedia jasa assurance untuk menguji penegakan Prinsip oleh sebuah organisasi.

KOMITMEN, INTEGRASI & PEMBANGUNAN KAPASITAS

1. Membangun sebuah proses penentuan materialitas yang kuat, sistematis, dan berkelanjutan di bawah tata kelola manajemen senior, termasuk keterlibatan lintas fungsi yang penting dalam lingkup organisasi.
2. Memastikan keterpaduan proses pengujian dalam organisasi yang meliputi proses-proses yang relevan, seperti pengelolaan resiko dan kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, serta kebijakan dan prosedur internal.
3. Menyediakan kemampuan dan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan hasil-hasil dari proses pengujian materialitas..

PENENTUAN MATERIALITAS

4. Menentukan batasan yang konsisten dan jelas, begitu juga maksud, jangka waktu, dan cakupan untuk pengujian materialitas, berdasarkan dugaan-dugaan yang telah didokumentasikan dengan benar.
5. Mengidentifikasi dan mewakili dengan adil topik-topik dari berbagai sumber.
6. Mengevaluasi kesesuaian topik-topik keberlanjutan material yang telah diidentifikasi berdasarkan kriteria-kriteria yang layak dan eksplisit*.
7. Menentukan kepentingan, kemungkinan, dan dampak saat ini dan di masa mendatang dari topik-topik keberlanjutan material yang telah diidentifikasi, dengan menggunakan kriteria-kriteria dan ambang nilai yang tepat*.
8. Mempertimbangkan konteks-konteks keberlanjutan, makroekonomi, geopolitik dan peraturan yang berkembang, serta kematangan topik dan permasalahannya, yang memungkinkan perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan industri secara geografis, budaya, dan tatanan operasionalnya.
9. Menyertakan cara-cara untuk mengatasi konflik atau dilema yang timbul dari harapan yang berbeda atau bertentangan terkait topik-topik material.

KOMUNIKASI

10. Menciptakan dan menyampaikan sebuah pemahaman dan pengutamaan yang menyeluruh dan berimbang terhadap topik-topik keberlanjutan material kepada organisasi dan para pemangku kepentingannya.
 - * Kriteria dan/atau ambang nilai yang dapat diandalkan, jelas, dan dapat dipahami sekaligus dapat ditiru, dapat dipertahankan dan dapat mematuhi assurance eksternal.

Sumber : AA1000AP (2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan pustaka acuan yang dapat menunjang peneliti untuk memberikan uraian, penjelasan, terkait teori serta metode penelitian yang peneliti gunakan.

Dalam penelitian terdahulu ini, peneliti tidak mendapatkan penelitian dengan judul yang sama persis seperti judul penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti mengambil beberapa penelitian yang dapat peneliti gunakan sebagai acuan dalam memperbanyak bahan yang akan di kaji pada penelitian ini.

1. Bertemakan materialitas

Dalam penelitian yang bertemakan materialitas ini, Geerts & Dooms (2020) melakukan penelitian terhadap pelabuhan pedalaman metropolitan Brussel (Belgia) dan menunjukkan hasil bahwa konten yang diharapkan dari laporan keberlanjutan dapat dilihat secara berbeda oleh berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam hal kepentingan relatif dari dimensi Triple Bottom Line (TBL), serta dalam hal indikator spesifik yang mewakili masalah material.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Beske et al., (2020) yang bertujuan untuk mengkaji analisis terkait pengungkapan materialitas secara berkelanjutan dan terintegrasi melalui pandangan teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan dengan sampel 132 laporan dari 33 perusahaan dengan 110 indeks pasar saham Jerman dengan rentang waktu 2014 dan 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Penelitian selanjutnya dengan judul

“Materiality Analysis in Sustainability Reporting: A Tool for Directing Corporate Sustainability Towards Emerging Economic, Environmental and Social Opportunities” yang dilakukan oleh Calabrese et al., (2019) dengan sampel penelitian yaitu perusahaan kecil dan menengah (UKM) di Italia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa aspek material tampaknya kurang dikomunikasikan dan sejumlah besar aspek keberlanjutan dihasilkan sebagai “isu yang muncul”, berdasarkan hasil tersebut, perusahaan yang menggunakan prosedur zona matriks dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang harus dimasukkan dalam kegiatan pelaporan keberlanjutan di masa mendatang. Perusahaan bisa merancang pengumpulan dan pelaporan data keberlanjutannya untuk memberikan informasi yang cukup rinci tentang semua aspek material dan yang muncul, sehingga meningkatkan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan.

Penelitian ke-4 dilakukan oleh Bellantuono et al., (2018) dengan judul “*Guiding Materiality Analysis for Sustainability Reporting: The Case of Agri-Food Sector*” dengan hasil penelitian menunjukkan adanya daftar topik spesifik sektor yang harus diperhatikan dalam laporan keberlanjutan, terlepas apa yang muncul dari penilaian materialitas perusahaan tertentu. Dari perspektif teoritis, penelitian ini berkontribusi untuk menjelaskan konsep aspek keberlanjutan dalam industri pangan secara sederhana tetapi memiliki makna inti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



Penelitian ke-5 dilakukan oleh Puroila & Mäkelä (2019), sampel dari penelitian ini adalah data empiris dari pengungkapan materialitas yang dikumpulkan dari 44 laporan keberlanjutan pada tahun 2013 hingga 2014, yang mengikuti pedoman pelaporan keberlanjutan GRI G4, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelajahi kemungkinan memperluas pemahaman konsep materialitas dan pertimbangan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaporan keberlanjutan, dengan hasil yang menunjukkan bahwa pendekatan teknis yang rasional untuk penilaian materialitas, diperkuat dengan penggunaan matriks materialitas secara umum diterima sebagai sarana untuk penilaian materialitas dan pelaporan.

Penelitian ke-6 dilakukan oleh Jones et al., (2018) dengan sampel penelitian 20 perusahaan konstruksi inggris teratas telah menganut materialitas, dengan tujuan memberikan pemeriksaan awal sejauh mana perusahaan konstruksi terkemuka di inggris dengan melaporkan materialitas dan menugaskan jaminan eksternal independen sebagai bagian dari proses pelaporan keberlanjutan mereka untuk menawarkan beberapa refleksi yang lebih luas tentang materialitas dan jaminan eksternal dalam pelaporan keberlanjutan, dengan hasil menunjukkan pola yang berbeda dalam analisis materialitas dari laporan yang dipilih. Laporan perusahaan konstruksi kurang transparan dalam analisis materialitas, sebagian besar laporan juga gagal mendefinisikan materialitas dan menyampaikan kepada pembaca alasan mengapa melakukan analisis materialitas. meskipun demikian, laporan didasarkan pada pedoman yang sama dan memiliki operasi bisnis yang serupa hanya ada perbedaan mencolok pada proses, keterlibatan pemangku kepentingan dalam analisis materialitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



Penelitian ke-7 dengan judul “*Materiality Assesment in Sustainability Reporting:*

Case Study of the Airline Industri” yang dilakukan oleh Aryal (2017) dengan hasil yang menunjukkan pola yang berbeda dalam analisis materialitas dari laporan yang dipilih, serta industri maskapai penerbangan kurang transparan dalam analisis materialitas, sebagian besar laporan juga gagal mendefinisikan dan menyampaikan materialitas kepada pembaca terkait alasan pokok dalam melakukan analisis materialitas. Meskipun demikian, laporan didasarkan pada pedoman yang sama dan memiliki operasi bisnis yang serupa. Adapun perbedaan yang mencolok terdapat pada proses dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam analisis materialitas ini.

2. Selain materialitas

Dalam penelitian yang bertemakan selain materialitas ini, Lassala et al., (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “*Sustainability Matter and Financial Performance of Companies*” yang bertujuan untuk menganalisis apakah mungkin meningkatkan kinerja keuangan dan menciptakan nilai dalam perusahaan dengan memasukkan kebijakan sosial berkelanjutan dan lingkungan dalam kegiatan perusahaan. Dengan sampel perusahaan yang terdaftar di pasar modal Spanyol, dan hasil penelitian ini menunjukkan yaitu untuk industri tertentu pengembalian aset merupakan kondisi yang diperlukan bagi perusahaan dengan leverage untuk mengurangi biaya utang karena profil keberlanjutan mereka dan akibatnya meningkatkan ROE mereka.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Brunstein et al., (2020) dengan sampel 188 kuesioner serta 160 laporan tertulis siswa untuk data kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan argumentasi tentang perlunya pengalaman belajar mengajar yang reflektif yang lebih kritis dalam pengajaran keuangan, yang mampu mendorong-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



perubahan dalam kerangka acuan siswa menuju keberlanjutan. Hasil dari penelitian ini adalah terlepas dari tingginya jumlah kesepakatan dengan refleksi dan tingkat refleksi kritis, penekanan hanya pada diskusi teoritis tentang praanggapan keberlanjutan tidak banyak berkontribusi pada penerapan konsep secara praktis.

Penelitian ke-3 dilakukan oleh Simatele & Dlamini (2020) dengan judul *“Finance and the social mission: a quest for sustainability and inclusion”*, sampel yang digunakan adalah 9 organisasi berbeda yang terlibat dalam menyediakan berbagai jenis layanan keuangan di Swaziland. Penelitian ini berfokus untuk menyelidiki apakah pencarian keberlanjutan di lembaga-lembaga perusahaan sosial keuangan mengarah pada penyimpangan misi baik lembaga formal atau informal memaikan peran penting sebagai intervensi untuk mendorong inklusi, yang mana antara misi sosial eksplisit dan pencarian implisit untuk keberlanjutan. Hasil penelitian ini adalah memperlihatkan bahwa perusahaan yang lebih kecil dan informal cenderung memiliki misi yang lebih sedikit. Pendekatan mitigasi dan manajemen risiko mereka seperti kewajiban kelompok dan penggunaan struktur tata kelola tradisional lebih disesuaikan dengan karakteristik kelompok yang dilayani.

Penelitian ke-4 dilakukan oleh Ellerup Nielsen & Thomsen (2018) yang berjudul *“Reviewing corporate social responsibility communication: a legitimacy perspective”*, dengan sampel penelitian 207 referensi dihasilkan dalam pencarian luas pertama untuk “CSR” yang dikombinasikan dengan “komunikasi”, yang bertujuan untuk menjawab penelitian komunikasi CSR dalam mengembangkan dan mendukung hasil yang dapat menjelaskan strategi dan praktik komunikasi CSR dengan lebih baik, serta mengeksplorasi peran legitimasi dalam penelitian komunikasi CSR.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya bahwa praktik dan aktivitas yang terkait dengan persepsi harapan, kebutuhan, dan persyaratan pemangku kepentingan dianggap paling efektif untuk perusahaan yang memiliki tujuan membangun atau mempertahankan legitimasi.

Penelitian ke-5 dilakukan oleh Chedrawi et al., (2020) berjudul “*CSR in the Lebanese banking sector: a neo-institutional approach to stakeholders’ legitimacy*”, dengan tujuan menganalisis dampak neo-institusionalisme dan peran pemangku kepentingan dalam melegitimasi praktik CSR di sektor perbankan Lebanon, dan sampel penelitian menggunakan 5 perusahaan diantara 10 besar perusahaan terkemuka periode Maret dan Agustus 2017 di Lebanon. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bank terbaik di Lebanon tidak bisa begitu saja mematuhi tekanan institusional untuk mendapatkan legitimasi mereka, mereka perlu mengembangkan kegiatan CSR yang ditargetkan untuk membangun legitimasi lokal, sedangkan bagi manajer mereka tidak bisa begitu saja mengadopsi perspektif manajerial secara instrumental untuk mendapatkan dukungan masyarakat, mereka perlu menyesuaikan perspektif dan praktik tersebut.

C. Kerangka Pemikiran

Laporan keberlanjutan memiliki kaitan erat dengan standar pelaporan, dalam hal ini Standar GRI berperan penting bagi setiap perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mewajibkan perusahaan untuk melaporkan laporan keberlanjutan sesuai dengan aturan dari Standar GRI yang memiliki berbagai macam indeks referensi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berbagai standar pelaporan keberlanjutan menekankan pada prinsip materialitas, khususnya GRI Standar 2016 dan AA1000AP. Dengan adanya penelitian ini, peneliti ingin memahami sejauh mana perusahaan yang menjadi objek penelitian :

1. Mendefinisi materialitas dalam laporan keberlanjutan

Laporan keberlanjutan yang ditekankan oleh berbagai standar adalah praktik pelaporan yang transparan terkait kontribusi negatif atau positif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa persetujuan tentang definisi materialitas secara universal, materialitas di dalam laporan keberlanjutan lebih mengacu kepada perbedaan makna yang saling bertentangan dan seringkali diperdebatkan. Namun, dalam beberapa pedoman pelaporan memberika otoritas bagi perusahaan untuk dapat memberikan keputusan terkait apakah isu tertentu material atau tidak. Meskipun demikian tujuan dari penilaian materialitas dalam laporan keberlanjutan ini adalah untuk memastikan kejelasan laporan dengan mengurangi praktik yang berlebihan pada isu yang dinilai kurang penting dan isu yang penting dalam laporan. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui sejauh mana perusahaan mendefinisikan materialitas yang mana konsep dalam pelaporan keberlanjutan mengacu pada masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan.

2. Mempertimbangan peran pemangku kepentingan dalam laporan keberlanjutan

Perusahaan yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan berusaha untuk memposisikan pelaporan mereka pada dampak yang paling penting dan isu yang relevan dalam kegiatan perusahaan, hal tersebut guna menciptakan data yang dapat membantu perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan keberlanjutan serta meningkatkan profitabilitas mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Komunikasi dengan para pemangku kepentingan adalah salah satu hal yang

efektif dalam melibatkan pemangku kepentingan. Karena, dengan terbentuknya komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan dan perusahaan mendorong munculnya informasi, ide, serta negoisasi yang baik di antara para pihak yang berkepentingan. Pertimbangan terkait pemangku kepentingan yang utama adalah untuk memuaskan para pemangku kepentingan yang berbeda dengan bersamaan. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran pemangku kepentingan dipertimbangkan dalam hal memprioritaskan masalah material yang diidentifikasi sesuai dengan pandangan dan kebutuhan para pemangku kepentingan.

3. Mengidentifikasi masalah materialitas utama dalam laporan keberlanjutan

Dalam pengungkapan penilaian materialitas dibutuhkan informasi mengenai bagaimana perusahaan mulai mengakses isu material dan isu apa saja yang dijadikan isu material utama dan dilaporkan dalam laporan keberlanjutan, masalah material utama dalam hal ini adalah isu yang dipilih dan memiliki dampak sangat signifikan. Masing-masing perusahaan memiliki dampak yang berbeda bagi ekonomi, lingkungan dan sosial. Namun, perbedaan ini akan terlihat jelas jika perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan yang industrinya sama.

Pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk dapat mengetahui hal apa yang mendasari dan bagaimana proses perusahaan dalam mengidentifikasi dan menentukan masalah material utama berdasarkan pedoman laporan keberlanjutan yaitu GRI Standar 102-46, GRI Standar 102-47, GRI Standar 103-1, dan AA1000AP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Gambar 2.5
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah kembali

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.